

Identifikasi Status Hak Tanah Pada Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bandung Barat

(Studi Kasus: Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah)

APRILANA¹, ASSYIFA IGHA PRATIWI²

1. Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung
2. Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung

Email: Passyifaigha@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang merupakan bagian dari wilayah Kawasan Bandung Barat (KBB). Pada tahun 2019 ada 10 kejadian bencana alam yang terdiri dari banjir bandang di dua kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 6 kejadian banjir bandang di Kecamatan Ngamprah dan 4 kejadian banjir di Kecamatan Padalarang. Daerah yang mengalami bencana banjir akan mengalami perubahan dalam bentuk luasan bidang tanah. Status Hak Tanah berperan penting dalam mengetahui keberadaan bidang tanah yang terkena bencana banjir. Status hak tanah tersebut berupa Hak Milik. Pada penelitian ini akan dikaji status hak milik pada kawasan yang terdampak rawan banjir dan sangat rawan banjir. Data yang digunakan adalah Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat, Peta Kawasan Rawan Bencana dan Peta Status Hak Tanah. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode *Overlay*. Dari hasil penelitian Kecamatan Ngamprah memiliki bidang hak milik sebanyak 11735 dengan luas ± 157.057 Ha persentase bidang hak milik di kelas rawan banjir sebesar 3%. Sedangkan bidang hak milik di kelas sangat rawan banjir mempunyai persentase sebesar 0%. Kecamatan Padalarang memiliki bidang hak milik sebanyak 12063 dengan luas ± 323.2 Ha persentase bidang hak milik di kelas rawan banjir sebesar 16%, sedangkan bidang hak milik sebanyak 1447 dengan luas ± 22.6 Ha di kelas sangat rawan banjir memiliki persentase sebesar 4%.

Kata kunci: *Kabupaten Bandung Barat, Kawasan Rawan Banjir, Status Hak Tanah, Overlay*

1. PENDAHULUAN

Kawasan Bandung Barat merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Jawa Barat yang Secara definitif menjadi daerah tingkat II berdasarkan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4688). Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya

kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung.

Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Kerawanan banjir adalah keadaan yang menggambarkan mudah atau tidaknya suatu daerah terkena banjir antara lain faktor meteorologi (intensitas curah hujan, distribusi curah hujan, frekuensi dan lamanya hujan berlangsung) dan karakteristik daerah aliran sungai (kemiringan lahan/kelerengan, ketinggian lahan, tekstur tanah dan penggunaan lahan).

Daerah yang mengalami bencana banjir akan mengalami perubahan dalam bentuk luasan bidang tanah. Status Hak Tanah berperan penting dalam mengetahui keberadaan bidang tanah yang terkena bencana banjir, Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi (*land*).

Sistem Informasi Geografis memungkinkan untuk menentukan status hak tanah pada kawasan rawan banjir dengan menggunakan metode *overlay* berbasis SIG dengan menggunakan beberapa data seperti Peta Kawasan Rawan Bencana dan Peta Status Hak Tanah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Data Penelitian

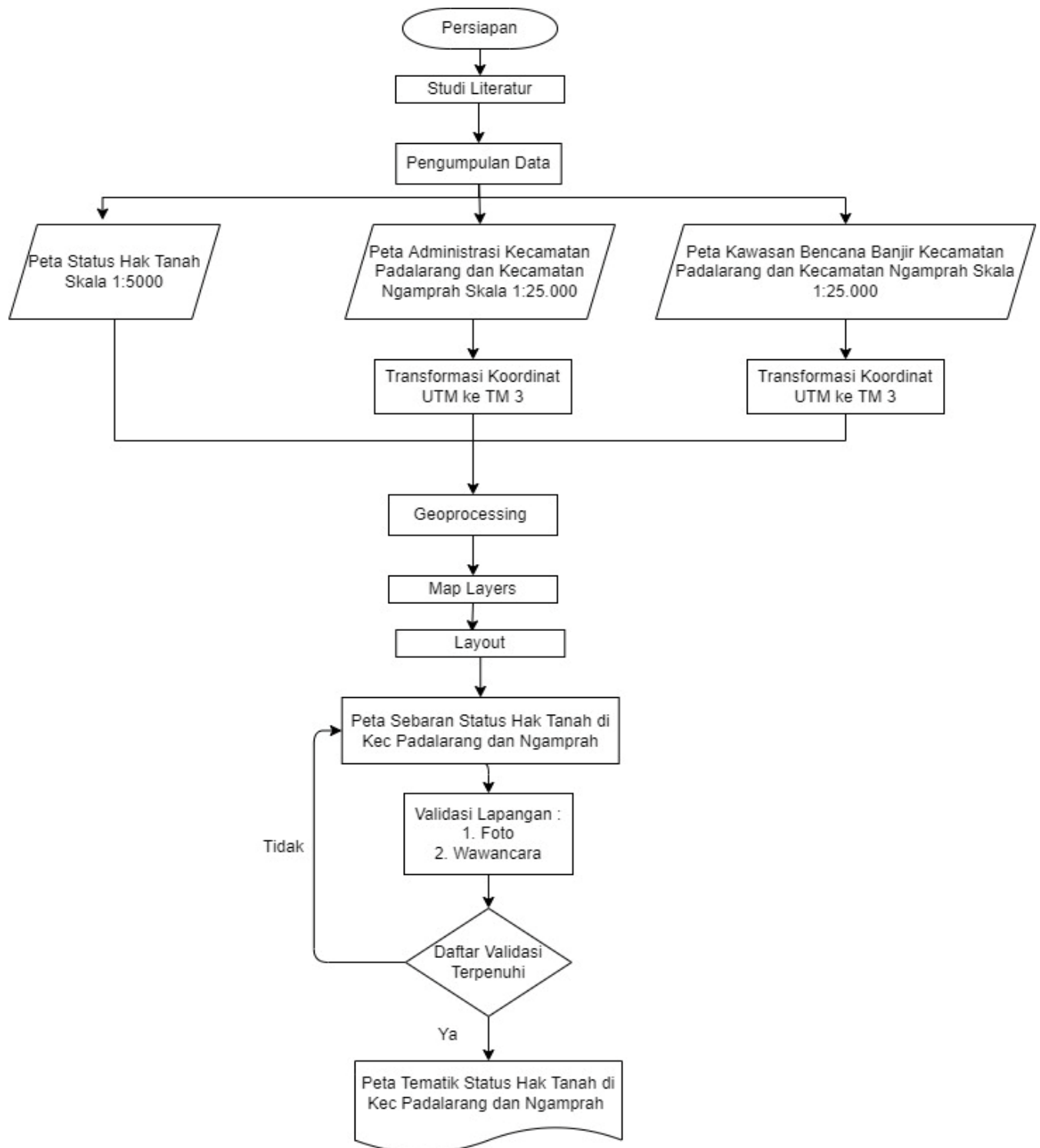
Data yang digunakan untuk penelitian tentang Identifikasi Status Hak Tanah pada Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Sumber Data Penelitian

No	Jenis Data	Format	Sumber	Tahun
1	Peta Administrasi Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah Skala 1:25.000	<i>SHP</i> (<i>ShapeFile</i>)	BIG	2020
2	Peta Kawasan Bencana Rawan Banjir Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah Skala 1:25.000	<i>SHP</i> (<i>ShapeFile</i>)	<i>Proceeding</i> II (FTSP Itenas)	2021
3	Peta Status Hak Tanah Skala 1:5000	<i>SHP</i> (<i>ShapeFile</i>)	BPN	2021

2.2 Diagram Alir Penelitian

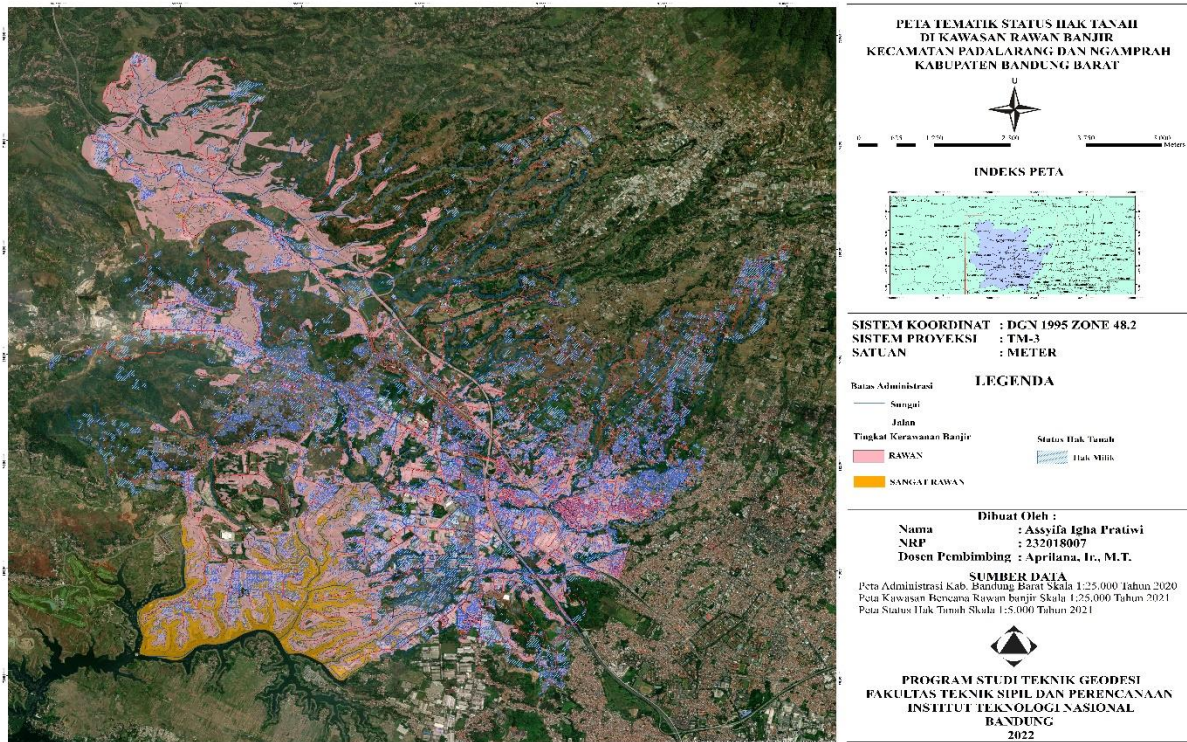
Diagram alir dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah Status Hak Tanah di Kawasan Rawan Banjir dan Sangat Rawan Banjir pada Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah dapat dilihat pada Gambar 2



Gambar 2. Peta Tematik Status Hak Tanah

Analisis terhadap status hak tanah pada kawasan rawan banjir di Kecamatan Ngamprah berupa persentase desa yang dapat disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Persentase Bidang yang terdampak Rawan Banjir di Kecamatan Ngamprah

No	Desa	Klasifikasi Rawan Banjir	Jumlah Bidang	Luas Bidang Tanah (M ²)	Persentase (%) Terhadap Bidang Rawan Banjir di Kecamatan Ngamprah
1	Bojongkoneng	Rawan	200	87585,50	1,70%
2	Cilame		3093	303384,26	26,36%
3	Cimanggu		2	0,255	0,02%
4	Cimareme		2833	386039,49	24,14%
5	Gadobangkong		1432	273994,49	12,20%
6	Margajaya		780	141972,49	6,65%
7	Mekarsari		193	36019,43	1,64%
8	Ngamprah		4	387,91	0,03%
9	Pakuhaji		0	0	0,00%
10	Sukatani		28	5723,55	0,24%
11	Tanimulya		3170	335463,95	27,01%

Analisis terhadap status hak tanah pada kawasan rawan banjir di Kecamatan Padalarang berupa persentase desa yang dapat disajikan pada Tabel 3

Tabel 3. Persentase Bidang yang terdampak Rawan Banjir di Kecamatan Padalarang

No	Desa	Klasifikasi Rawan Banjir	Jumlah Bidang	Luas Bidang Tanah (M ²)	Persentase (%) Terhadap Bidang Rawan Banjir Di Kecamatan Padalarang
1	Campakamekar	Rawan	677	426346,12	5,6%
2	Ciburuy		2127	411195,43	17,6%
3	Cimerang		482	316323,51	4,0%
4	Cipeundeuy		3748	988108,31	31,1%
5	Jayamekar		246	59451,40	2,0%
6	Kertajaya		846	189115,09	7,0%
7	Kertamulya		995	125011,53	8,2%
8	Laksanamekar		2062	409601,26	17,1%
9	Padalarang		716	228956,26	5,9%
10	Tagogapu		164	77612,82	1,4%

Analisis terhadap status hak tanah pada kawasan sangat rawan banjir di Kecamatan Padalarang berupa persentase desa yang dapat disajikan pada Tabel 4

Tabel 4. Persentase Bidang yang terdampak Sangat Rawan Banjir di Kecamatan Padalarang

No	Desa	Klasifikasi Rawan Banjir	Jumlah Bidang	Luas Bidang Tanah (M ²)	Persentase (%) Terhadap Bidang Sangat Rawan Banjir Di Kecamatan Padalarang
1	Campakamekar	Sangat Rawan	6	1223,13	0,41%
2	Ciburuy		0	0	0,00%
3	Cimerang		20	6153,75	1,38%
4	Cipeundeuy		1186	201075,37	81,96%
5	Jayamekar		1	443,16	0,07%
6	Kertajaya		7	1662,37	0,48%
7	Kertamulya		0	0	0,00%
8	Laksanamekar		221	14938,05	15,27%
9	Padalarang		0	0	0,00%
10	Tagogapu		6	520,61	0,41%

Peta Status Hak Tanah memiliki dua data yang berbeda yaitu Status Hak Tanah pada Kawasan Rawan Banjir dan Status Hak Tanah pada Kawasan Sangat Rawan Banjir. Pada daerah kawasan rawan banjir status hak milik di Kecamatan Ngamprah terdapat 11.735 bidang tanah dengan total luas ± 157 Ha dan pada Kecamatan Padalarang terdapat 12.063 bidang dengan total luas ± 323 Ha. Pada daerah kawasan sangat rawan banjir status hak milik di Kecamatan Padalarang terdapat 1447 bidang tanah dengan total luas ± 22.6 Ha.

4. KESIMPULAN

Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang terdapat 25.245 bidang hak milik dengan luas sebesar $\pm 5.028.309$ Ha. Kecamatan Ngamprah memiliki persentase bidang hak milik di kelas rawan banjir sebesar 3%. Sedangkan bidang hak milik di kelas sangat rawan banjir mempunyai persentase sebesar 0%. Kecamatan Ngamprah memiliki 11 desa diantaranya di Desa Tanimulya yang berada di kelas rawan banjir yang berstatus hak milik tertinggi sebesar 27.1% dan yang terendah berada di Desa Cimanggu sebesar 0.02%. Kecamatan Padalarang memiliki persentase bidang hak milik di kelas rawan banjir sebesar 16%, sedangkan bidang hak milik di kelas sangat rawan banjir memiliki persentase sebesar 4%. Kecamatan Padalarang memiliki 10 desa diantaranya di Desa Cipeundeuy yang berada di kelas rawan banjir yang berstatus hak milik tertinggi sebesar 31.1% dan terendah berada di Desa Tagogapu sebesar 1.4%. Sedangkan pada kelas sangat rawan banjir yang berstatus hak milik tertinggi juga berada di Desa Cipeundeuy sebesar 81.96% dan yang terendah berada di Desa Ciburuy, Desa Kertamulya dan Desa Padalarang sebesar 0%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penelitian ini khususnya kepada instansi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No 3 Tahun 2016

Akhbar K.R. *Analisis Spasial Rawan Banjir Terhadap Dampak Lingkungan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah*. Staf Pengajar pada Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako.

Desyana B, Larasati R. *Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Raharjo N.D. *Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Bondowoso dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis*. Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang.

Trihadi T. 2021. *Analisis Spasial Area Rawan Banjir Pada Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat*. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Bandung.